

TESIS

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM,
REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AND CLARITY OF
BUDGET TARGETS ON REGIONAL FINANCIAL
PERFORMANCE WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT
AS A MODERATION VARIABLE***

**ANISAH NADYA ANANTA
A062212032**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM,
REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AND CLARITY OF
BUDGET TARGETS ON REGIONAL FINANCIAL
PERFORMANCE WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT
AS A MODERATION VARIABLE***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
disusun dan diajukan oleh

**ANISAH NADYA ANANTA
A062212032**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

disusun dan diajukan oleh

ANISAH NADYA ANANTA
A062212032

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 23 Februari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

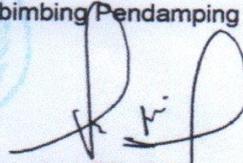
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



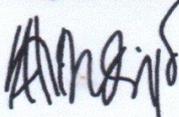
Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, SE., M.Si.
NIP. 196305151992031003



Dr. Sri Sundari, SE., M.Si., Ak., CA.
NIP. 196602201994122001

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Aini Indriawati, SE., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Anisah Nadya Ananta
NIM : A062212032
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Magister (S2)

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pengelolaan Keuangan Daerah
Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis/disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/ diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Februari 2024

Yang me nbuat pernyataan,


Anisah Nadya Ananta

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi”**.

Penulis sangat menyadari dan bersyukur telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah mengeluarkan pikiran, waktu, dan gagasannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orangtua saya Bapak Ir. Umikuslan dan Nur Intan Paapa, S,Pd yang telah memberikan doa restu dan kasih sayang serta dukungan semangatnya yang selama ini telah mendidik, membesarkan, dan mendampingi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM., CWM., CRA., CRP selaku Dekan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, SE., M,Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Sri Sundari, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan pengertian membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini mulai dari pemilihan judul.
5. Bapak Prof. Dr. Alimuddin, SE,M.M.,Ak.,CPMA Ibu Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak.,M.Si.,CA dan Prof. Dr. Nirwana, SE., Ak.,M.Si., CA selaku tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis mulai dari proses ujian proposal hingga bisa sampai ketitik penyelesaian tesis ini.

6. Kakak kakak tersayang Muhammad Ibnu Syawal S.STP dan Fildzah Fadilah Albar, S.H serta keluarga besar saya. Terima kasih atas nasehat, dukungan dan bantuan yang diberikan.
7. Pimpinan OPD Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe dan para staff pada OPD tempat peneliti melakukan penelitian telah memberikan kesempatan dan menerima penulis untuk melakukan penelitian.
8. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmunya kepada peneliti. Dan para staf serta karyawan Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu sehingga urusan administrasi peneliti menjadi lancar.
9. Kepada teman-teman seperjuangan magister akuntansi Angkatan 2021/2, terkhusus MAKSI Regular B atas bantuan, dukungan dan kebersamaan selama proses perkuliahan sampai pada akhir studi.
10. Kepada sahabat sahabat saya di Unaaha yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian selama dikonawe sampai ke konawe selatan. Terima kasih atas nasehat dan dukungan yang diberikan.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan tesis ini. *Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, Februari 2024

Penulis

Anisah Nadya Ananta

ABSTRAK

ANISAH NADYA ANANTA. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi* (dibimbing oleh Abdul Hamid Habbe dan Sri Sundari).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan daerah, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja keuangan daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan yaitu seluruh pegawai pada 47 organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe. dengan jenis sampel yang digunakan, yaitu sampel propusif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 139 pegawai yang terdiri atas 3 orang di setiap OPD masing-masing yang terdiri atas kepala dinas atau sekretaris, kasubbag keuangan, dan kasubag perencanaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan daerah, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan data diketahui bahwa komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan daerah, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja keuangan daerah.

Kata kunci: sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran, kinerja keuangan daerah, komitmen organisasi



ABSTRACT

ANISAH NADYA ANANTA. *The Effect of Internal Control System, Regional Financial Management, and Clarity of Budget Targets on Regional Financial Performance with Organizational Commitment as a Moderating Variable* (supervised by Abdul Hamid Habibe and Sri Sundar)

This research aims to test and analyze the effect of internal control system, regional financial management, and the clarity of budget target on regional financial performance with organizational commitment as a moderating variable. This research was a quantitative study with the type of sample used was proportional sampling technique. The population used was employees at 47 Regional Apparatus Organization (OPD) of South Konawe Regency and Konawe Regency. The sample was 139 employees consisting of three people in each OPD who were the head of department or secretary, head of finance sub-division, and head of planning sub-division. The data analysis used was multiple regression analysis and moderation. The research results show that the internal control system, regional financial management, and clarity of budget targets have a positive and significant effect on regional financial performance. Organizational commitment can strengthen the effect of the internal control system, regional financial management, and clarity of budget targets on regional financial performance.

Keywords: internal control system, regional financial management, clarity of budget targets, regional financial performance, organizational commitment



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
PRAKATA	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	15
2.1.1 Teori Kontinjensi	15
2.1.2 Teori Penetapan Tujuan (<i>Goal Setting Theory</i>) ..	17
2.1.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	18
2.1.3.1 Definisi Pengendalian Internal	18
2.1.3.2 Prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Internal ...	20
2.1.3.3 Unsur-unsur Pengendalian Internal	21
2.1.3.4 Tujuan Dan Tanggung Jawab Atas Pengendalian Internal	22
2.1.3.5 Indikator Sistem Pengendalian Internal	23
2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah	27
2.1.4.1 Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah	27
2.1.4.2 Indikator Pengelolaan Keuangan	29
2.1.5 Kejelasan Sasaran Anggaran	31
2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	34
2.1.7 Komitmen Organisasi	38
2.1.8.1 Definisi Komitmen Organisasi	38
2.1.8.2 Manfaat Komitmen Organisasi	39
2.1.8.3 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi	39
2.1.8.4 Indikator Komitmen Organisasi	40
2.2 Tinjauan Empiris	41
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	48
3.1 Kerangka Konseptual	48
3.2 Hipotesis	52
3.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja keuangan Daerah	52
3.2.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja keuangan Daerah	54
3.2.3 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja keuangan Daerah	55

3.2.4	Pengaruh Moderasi Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja keuangan Daerah.....	56
3.2.5	Pengaruh Moderasi Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja keuangan Daerah.....	57
3.2.6	Pengaruh Moderasi Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah.....	59
BAB IV METODE PENELITIAN.....		61
4.1	Rancangan Penelitian.....	61
4.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	61
4.3	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	62
4.3.1	Populasi.....	62
4.3.2	Sampel	62
4.4	Jenis dan Sumber Data	64
4.5	Metode Pengumpulan Data.....	64
4.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	65
4.6.1	Variabel Penelitian	65
4.6.2	Definisi Operasional	65
4.7	Instrumen Penelitian	67
4.8	Teknik Analisis Data	68
4.8.1	Analisis Deskriptif.....	68
4.8.2	Uji Asumsi Klasik.....	69
4.8.3	Uji Hipotesis.....	71
BAB V HASIL PENELITIAN.....		73
5.1	Deskripsi Data.....	73
5.2.1	Karakteristik Responden	73
5.2.2	Uji Instrumen	73
5.2.3	Analisis Statistik Deskriptif	75
5.2.4	Uji Asumsi Klasik.....	84
5.2.5	Uji Hipotesis.....	88
BAB VI PEMBAHASAN		93
6.1	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	93
6.2	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	96
6.3	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	100
6.4	Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Daerah	103
6.5	Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	104
6.6	Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Kejelasan	

Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah .	106
.....	106
BAB VII PENUTUP	109
7.1 Kesimpulan	109
7.2 Implikasi	111
7.3 Keterbatasan Penelitian	111
7.4 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	123

DAFTAR TABEL

4.1	Data Sampel OPD Konawe selatan.....	62
4.2	Data Sampel OPD kabupaten Konawe.....	63
4.3	Definisi Operasional Variabel	66
4.4	Penentuan Kategori Rata-Rata Skor Pernyataan Responden.....	69
5.1	Karakteristik Responden	73
5.2	Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	74
5.3	Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel.....	76
5.4	Rekapitulasi Jawaban Responden Atas Variabel Sistem Pengendalian Internal.....	78
5.5	Rekapitulasi Jawaban Responden Atas Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah.....	79
5.6	Rekapitulasi Jawaban Responden Atas Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran	81
5.7	Rekapitulasi Jawaban Responden Atas Variabel Komitmen Organisasi.....	82
5.8	Rekapitulasi Jawaban Responden Atas Variabel Kinerja Keuangan Daerah.....	83
5.9	Hasil Uji Autokorelasi.....	84
5.10	Hasil Uji Multikolinearitas.....	86
5.11	Hasil Uji t	88
5.12	Koefisien Determinasi.....	90
5.13	Hasil Uji t MRA.....	90
5.14	Uji Koefisien Determinasi	92
6.1	Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian	93

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	51
2.2 Kerangka Konseptual	52
5.1 Normal Probability Plot.....	86
5.2 Hasil Uji Heterokedasitas	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran I : Kuesioner.....	125
Lampiran II : Hasil Uji SPSS.....	134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan dalam suatu negara merupakan salah satu faktor terpenting dalam kemajuan negara. Penerapan sistem pemerintahan yang baik dalam suatu negara dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki negara. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 22D ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya menerapkan asas otonomi daerah untuk melimpahkan kewenangannya dan menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah dengan penuh tanggungjawab, kemudian menyesuaikan, membagi, dan memanfaatkan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Raheni dkk, 2019).

Sebagai organisasi Sektor Publik, Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki Kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, disamping itu pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pembagian tugas yang baik pada pemerintahan yang ada dilingkungan daerah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi tersebut diajukan kepada pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara Negara yang diamanatkan kepada mereka. (Afrina, 2015). Kinerja merupakan suatu keberhasilan atau kesuksesan yang sudah dilaksanakan oleh karyawan sesuai dengan tujuan dari organisasi yang sudah ditetapkan. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat diukur dari capaian kinerjanya (Anwar, 2018). Menurut Putra (2018)

pertanggungjawaban kinerja di daerah wajib untuk disampaikan supaya bisa dinilai apakah pemerintah daerah tersebut sudah berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut Mahsun dkk (2012), Kinerja (*performance*) biasa diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010) pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah instrumen yang digunakan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja terdiri dari aktivitas pendokumentasian, proses pelaksanaan yang terdiri atas proses dan aktivitas yang dilakukan untuk mengubah *input* menjadi *output*.

Pemerintah daerah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwasanya disini Pemerintah Daerah diberikan pelimpahan wewenang pembangunan untuk tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan. Dimana kinerja keuangan pemerintah merupakan salah satu gambaran maupun bukti pemerintah telah berhasil untuk mengelola dana dan melakukan program kerja dengan sesuai. Efisiensi dan efektifitas dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan merupakan salah satu faktor dari kinerja keuangan (Sukaesih 2014). Sedangkan menurut Sochib (2016: hal 40) penentuan keberhasilan pemerintah maupun perusahaan ukuran kinerja keuangan

didasarkan pada aktivitasnya. Dilihat dari sini betapa pentingnya kinerja keuangan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengetahui serta mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan pemerintah dari aktivitas keuangannya. Mahsun (2006) mengatakan bahwa: “kinerja itu sendiri adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja”. Pemerintah dapat dikatakan mempunyai kinerja keuangan yang baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan.

Kabupaten Konawe selatan merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Sulawesi Tenggara dan mendapat sorotan publik. Berdasarkan LHP LKPD konawe selatan anggaran 2021 perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat beberapa temuan terkait kinerja keuangan daerah. Temuan tersebut antara lain terkait kewajaran penyajian laporan keuangan diantaranya, pendapatan daerah masih belum tercapai secara optimal, belanja daerah belum efisien dan aset daerah belum di Kelola secara optimal. Selain itu adanya permasalahan keterlibatan administrasi keuangan daerah seperti masih terdapat transaksi keuangan yang tidak didukung oleh dokumen sah, masih terdapat transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir terkait pengendalian internal keuangan daerah dimana terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintah, masih terdapat beberapa pegawai yang belum memahami tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. (<https://sultra.bpk.go.id>)

Selain Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, salah satu kabupaten yang mendapat sorotan adalah kabupaten Konawe yang merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan hasil audit BPK perwakilan Sulawesi Tenggara Pemerintah Kabupaten Konawe

memperoleh opini WTP selama delapan kali berturut - turut. Pencapaian tersebut bukan berarti tidak ada permasalahan terkait kinerja keuangan pemerintah kabupaten Konawe. Terdapat beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Konawe antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer (Sari E.P, 2019). Berdasarkan fenomena tersebut permasalahan terkait kinerja keuangan daerah masih menjadi masalah pemerintah daerah di Indonesia khususnya di kabupaten konawe dan kabupaten konawe selatan.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah serta dalam peningkatan kualitas kinerja keuangan pemerintah perlu sistem pengendalian intern pemerintah yang harus diterapkan dalam lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program kinerja pada instansi pemerintah sangat tergantung pada hasil pembenahan yang dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengendalian intern suatu organisasi yang baik akan dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan organisasi. Sementara kualitas pengendalian internal yang buruk akan dapat mendorong kinerja keuangan organisasi semakin menurun.

Berdasarkan fenomena diatas dijelaskan bahwa salah satu kriteria yang digunakan untuk memberikan opini adalah efektivitas pengendalian internal. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, sistem

pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal dalam instansi pemerintah meliputi semua proses yang memiliki kaitan dengan pengawasan kepada organisasi sehingga dapat memberikan kepercayaan bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan pengukuran yang telah direncanakan.

Menurut Zodia (2015), Sistem pengendalian internal yang dikemukakan oleh *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang dapat dipengaruhi sehingga bisa memberikan jaminan bahwa melalui efisiensi, efektifitas, taat pada undang – undang serta penyajian laporan keuangan yang baik tujuan organisasi itu dapat dicapai. Menurut Romney & Steinbart (2014), pengendalian internal adalah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian dipenuhi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal (2) ayat (3) menjelaskan, sistem pengendalian internal pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal dibutuhkan untuk mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang baik, sehingga memberi keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai telah dilaksanakan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Ikhyanuddin ddk (2022) dan blongkod (2023) menyatakan bahwa Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan hasil penelitian Pradana (2022) menyatakan bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Selain pengendalian internal, salah satu faktor yang diduga penyebab Kinerja Pemerintah Daerah rendah diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dalam proses Perencanaan dan Penganggaran APBD, pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggung jawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang saling keterkaitan antara sasaran straregis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh dalam meningkatkan kinerja suatu instansi atau organisasi (Suryana dkk, 2017).

Dalam proses Penganggaran, pemerintah daerah selalu mengalami keterlambatan di dalam pengesahan perda APBD. Keterlambatan ini menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun Anggaran berjalan sehingga terjadi keterlambatan pembangunan daerah tersebut (Ernawilis, 2015). Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat dibutuhkan. Maka perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting untuk dilakukan, baik dalam aspek anggaran ataupun aspek pemeriksaan. Pemerintah Daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dengan menyajikan laporan kinerja dalam bentuk laporan keuangan daerah sebagai wujud pertanggungjawaban perencanaan yang dibuat atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Halim (2002) mengelola keuangan daerah berarti mengelola anggaran daerah, meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan anggaran. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Salah satu hal penting yang menjadi pertimbangan dalam mengelola keuangan daerah adalah adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah daerah. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada sistem pengendalian internal pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh blongkod (2023) dan sains F (2018) menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang berarti setiap peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah berdampak pada peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan hasil penelitian Liow (2021) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, Salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu kejelasan sasaran anggaran (Indrayani dkk, 2017), Kejelasan Sasaran Anggaran menggambarkan luasnya tujuan Anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik serta dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. Kejelasan tujuan Anggaran merupakan hal yang paling penting dalam pencapaian suatu tujuan organisasi karena akan menentukan arah tujuan suatu organisasi. Tujuan Anggaran yang

tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, tekanan dan ketidakpuasan dari karyawan yang akan berdampak buruk terhadap Kinerja Manajerial (Suyanto, 2011). Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauh mana tujuan Anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar Anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian Anggaran tersebut. Kejelasan Sasaran Anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun Anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai Instansi Pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi. (Amril, 2014). Selain itu hasil penelitian penelitian Syukur (2022) dan Radiansyah dkk. (2022) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Berbeda dengan hasil penelitian Pratama (2019) menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Dari beberapa penelitian, peneliti menambahkan variabel moderasi yakni Komitmen Organisasi. Dalam hal ini bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan daerah dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja keuangan daerah. Hal tersebut di dukung dari beberapa penelitian yaitu satriawan & dewi (2020) menunjukkan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan daerah, silfiani & fauzi (2021) menunjukkan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dan handayani (2020) menunjukkan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. Alasan tersebut dikarenakan organisasi atau pegawai memiliki rasa komitmen yang tinggi terhadap organisasi

maka akan melakukan semaksimal mungkin agar tujuan dalam organisasi tercapai dan juga berusaha mematuhi prosedur atau pengendalian yang ditetapkan.

Komitmen organisasi dapat tercipta jika organisasi/perusahaan memberi dorongan, respek, menghargai kontribusi dan memberi apresiasi bagi individu dalam pekerjaannya. Hal ini berarti, jika organisasi peduli dengan keberadaan dan kesejahteraan personal anggota/pegawai dan juga menghargai kontribusinya, maka anggota/pegawai akan meningkatkan komitmennya terhadap organisasi. Komitmen organisasi secara umum dapat diartikan sebagai keterikatan pegawai pada organisasi dimana pegawai itu bekerja. Komitmen dibutuhkan organisasi agar sumber daya manusia yang kompeten dalam organisasi dapat terjaga dan terpelihara dengan baik.

Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, memiliki persepsi yang positif dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Sebaliknya, pegawai dengan komitmen organisasi yang rendah akan memiliki perhatian yang rendah untuk mencapai tujuan organisasi, bahkan cenderung mencoba memenuhi kepentingan pribadi (Sirin, 2020). Hal ini sesuai dengan penelitian Satriawan & Dewi (2020) menyatakan Komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun penelitian yang berbeda oleh Cantika (2021) menyatakan Komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian Silfiani dan Fauzi (2021) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya komitmen terhadap pemahaman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang berjalan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, untuk itu perlu

dilakukan perubahan yaitu adanya komitmen dari seluruh komponen organisasi mulai dari pimpinan sampai staf untuk menyiapkan anggaran dan kegiatan untuk memahami pengelolaan keuangan daerah.

Adanya komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasi maka semakin tinggi pula tercapainya ketepatan sasaran anggaran OPD (Kharisma, 2021). Hal ini disebabkan karena pegawai yang didukung dengan komitmen yang tinggi terhadap organisasi (instansi) pemerintah daerah maka akan lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Sehingga komitmen pegawai berimplikasi pada pembuat anggaran untuk bekerja mencapai target anggaran yang ditentukan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Astika (2017). Penelitian ini menunjukkan komitmen organisasi memoderasi pengaruh kejelasan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.

Grand Theory yang menjadi sebuah landasan dalam penelitian ini yaitu teori Kontinjensi. Pendekatan kontingensi timbul sebagai pengaturan organisasi dimana pengendalian yang optimal itu dapat diterima pada semua pengaturan dan perusahaan sehingga organisasi dimana pengendalian dioperasikan. Suatu titik temu antara sistem pengendalian dan variabel kontingensi kontekstual dihipotesiskan untuk meningkatkan kinerja organisasi (individu). Teori kontingensi muncul sebagai jawaban atas pendekatan yang universal yang membantah bahwa desain pengendalian yang optimal dapat diterapkan dalam perusahaan secara keseluruhan. Teori kontingensi adalah teori kemungkinan variabel-variabel yang berhubungan dengan kinerja pencapaian tugas yang sangat menentukan pada gerak akselerasi pencapaian tujuan organisasi (Govindarajan, 1988).

Selain teori Kontinjensi, penelitian ini juga menggunakan teori penetapan tujuan. Teori penetapan tujuan yang dikemukakan oleh Locke (1968) menyatakan

bahwa tujuan dari individu yang disadari adalah faktor utama yang menentukan perilaku. Perilaku individu akan terus berjalan sampai perilaku tersebut mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Teori ini menyatakan bahwa kinerja akan tergantung pada tingkat kesukaran tujuan, keterincian tujuan dan komitmen organisasi terhadap tujuan. Teori penetapan tujuan juga mengatakan bahwa perilaku individu diatur oleh pemikiran dan niat seseorang. Jika individu berkomitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai, maka hal ini akan mempengaruhi tindakan dan konsekuensi kinerjanya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ilham (2022) dengan beberapa perbedaan. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada variabel dependen, yaitu kinerja keuangan daerah. Perbedaan pertama terletak pada variabel independen. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu sistem pengendalian internal (Velia, 2020), pengelolaan keuangan daerah (Jannah, 2021), dan kejelasan sasaran anggaran (Pratama, 2019). Penelitian Ilham (2022) menggunakan variabel independen yaitu akuntabilitas dan value for money. Perbedaan kedua terletak pada variabel moderasi. Penelitian ini menambahkan variabel moderasi komitmen organisasi (Krisnawati, 2017), sedangkan penelitian Ilham (2022) menggunakan variabel moderasi standar akuntansi pemerintahan. Perbedaan ketiga terkait teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori kontinjensi, sedangkan penelitian Ilham (2022) menggunakan teori stewardship.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang dapat dibuat sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja keuangan daerah?

2. Apakah Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap Kinerja keuangan daerah?
3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?
4. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan daerah?
5. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah?
6. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan atas rumusan masalah yang dibuat.

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kinerja keuangan daerah
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja keuangan daerah
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan daerah
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja keuangan daerah

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kajian tambahan mengenai Sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran, kinerja keuangan pemerintah daerah dan komitmen organisasi.
2. Kegunaan Praktis, Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah, khususnya kabupaten konawe selatan dan kabupaten konawe dalam rangka untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini mengacu pada pedoman penulisan Tesis dan Disertasi (2013) yang terdiri dari 7 bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, yaitu bab yang menguraikan secara singkat latar belakang penelitian yang menjadi pokok pikiran, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yaitu bab yang memuat uraian sistematis tentang landasan teori penelitian.

Bab III kerangka konseptual dan hipotesis, yaitu bab yang berisi mengenai kajian teoritis dan empiris mengenai masalah penelitian ini serta pengembangan hipotesisnya.

Bab IV Metode penelitian, bab ini berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian, rancangan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, serta Teknik pengumpulan data dan analisisnya.

Bab V Hasil Penelitian, bab ini menguraikan deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian. Penyajian hasil penelitian memuat deskripsi tentang data dan temuan penelitian berupa narasi yang disertai analisis statistik, pengujian hipotesis, tabel, grafik, dan gambar.

Bab VI Pembahasan, tujuan pembahasan adalah menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru.

Bab VII Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran. Bab penutup dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Kontinjensi

Teori kontinjensi merupakan konsep yang dirumuskan oleh *Drazin dan Van de Ven*. Teori ini mengajukan tiga pendekatan penting dalam riset kontinjensi, yaitu seleksi (*selection*), interaksi (*interaction*), dan sistem (*system*). Teori kontinjensi dalam arti luas menyatakan bahwa keefektivitasan organisasi merupakan suatu fungsi kesesuaian antara sistem lingkungan dimana suatu organisasi tersebut beroperasi. Teori kontinjensi merupakan alat pertama dan yang paling terkenal untuk menjelaskan berbagai variasi dalam struktur organisasi.

Teori Kontinjensi merupakan pendekatan yang menginginkan supaya kinerja dari suatu organisasi bisa optimal. Teori kontinjensi ini berperan dalam pemberian perhatian mengenai sifat lingkungan pada strategi dan struktur organisasi, keperluan yang dibutuhkan organisasi, dan juga cara organisasi tersebut itu menjalankan struktur organisasi yang baik seharusnya menanggapi sejumlah variabel (*contingencies*). Ada beberapa hal yang menurut teori kontinjensi penting dalam suatu organisasi diantaranya penggunaan teknologi, penggunaan lingkungan operasi dan ukuran organisasi. Efektivitas atau berhasilnya pengelolaan dalam suatu organisasi tidak harus tertuju pada cara dan tujuan pengelolaan, namun juga dilihat keadaan lingkungan yang berada di luar kendali. Selain memiliki pengaruh pada kinerja dalam proses pengendalian yang dilakukan, lingkungan juga mempengaruhi apa jenis pengendalian yang nantinya digunakan (Gumelar, 2017).

Teori kontijensi merupakan kesesuaian pimpinan yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat. Teori yang dikemukakan oleh fiedler's ini berpendapat bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi dimana mereka memimpin. Teori kontingensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk berbagai macam tujuan (Wulandari, 2011). Dimana terdapat beberapa keterlibatan dari variabel yang ada, salah satunya adalah variabel moderating, yaitu jenis variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Suatu variabel independen dan dependen bisa menghasilkan hubungan negatif atau positif tergantung pada variabel yang memoderasinya.

Fisher (1998) membuat kerangka kerja (*framework*) untuk pengendalian kontinjensi proses dalam pengendalian kontinjensi ditujukan dalam siklus yang terjadi berulang-ulang. Isu yang muncul dalam pengembangan model ini adalah bagaimana menentukan faktor-faktor kontinjensi. Faktor-faktor tertentu dapat ditentukan melalui kepuasan manajemen sementara faktor-faktor lain ditentukan secara *exogenous*. Setelah perusahaan menentukan tujuan dan faktor-faktor kontinjensi, perusahaan tersebut akan berusaha mencapai tujuan tersebut. Sistem pengendalian *cybernetic* hanya merupakan salah satu bagian dari keseluruhan pengendalian organisasi karena masih banyak faktor diluar sistem pengendalian yang mempengaruhi hasil yang diharapkan perusahaan. Setelah hasilnya diukur dan dilakukan pemberian *reward* kemudian informasi tersebut diumpun balikkan terhadap kerangka kerja dan mungkin akan mempengaruhi pengembilab keputusan perusahaan di masa depan.

2.1.2 Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Motivasi adalah salah satu bentuk dari teori penetapan tujuan. Teori ini sebagai teori utama (*grand theory*) yang dikemukakan oleh Locke (1968) yang menekankan perlu adanya hubungan antara tujuan yang telah ditetapkan terhadap output dari kinerja. Teori penetapan tujuan menyatakan bahwa pemikiran dan niat merupakan penggerak dari perilaku setiap individu. Perilaku dari kinerja individu dipengaruhi oleh pemahamannya mengenai tujuan dari organisasinya tersebut. Tingkat kinerja atau tujuan yang ingin dicapai dapat dilihat dari sasaran individu tersebut. Untuk mewujudkan kinerja yang optimal dibutuhkan motivasi yang kuat, yang didasari oleh niat yang positif dari individu.

Goal setting theory mengatakan bahwa tujuan dari individu yang disadari adalah faktor utama yang menentukan perilaku. Perilaku individu akan terus berjalan sampai perilaku tersebut mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Teori ini menyatakan bahwa kinerja akan tergantung pada tingkat kesukaran tujuan, keterincian tujuan dan komitmen organisasi terhadap tujuan. *Goal setting theory* juga mengatakan bahwa perilaku individu diatur oleh pemikiran dan niat seseorang. Jika individu berkomitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai, maka hal ini akan mempengaruhi tindakan dan konsekuensi kinerjanya.

Kusuma (2013) menyatakan ketepatan anggaran dipengaruhi oleh penetapan tujuan. Visi dan misi organisasi merupakan tujuan utama sehingga diperlukan target kinerja yang jelas, oleh sebab itu setiap organisasi diharuskan menetapkan tujuan sasaran (*goal*), yang kemudian diformulasi dalam rencana anggaran. Sehingga dalam perencanaan anggaran perlu dicantumkan sasaran atau target yang ingin dicapai organisasi, tidak hanya memuat jumlah nominal dan perencanaan yang dibutuhkan setiap program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi. Teori ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan individu

dalam menyusun dan mengelola anggaran merupakan tujuan yang ingin dicapai. Dengan menggunakan pendekatan teori penetapan tujuan, efektifitas implementasi ketercapaian anggaran diidentikkan sebagai tujuannya.

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

2.1.3.1 Definisi Pengendalian Internal

Menurut Romney & Steinbart (2015) pengendalian internal (*internal control*) adalah “Pengendalian internal adalah sebuah proses yang diimplementasikan untuk memberikan jaminan yang memenuhi beberapa objektif dari pengendalian internal, diantaranya yaitu menjaga aset, menjaga catatan dalam detail yang cukup untuk pelaporan aset perusahaan yang tepat dan akurat, menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, menyiapkan laporan keuangan dengan kriteria yang ditentukan, mendorong dan meningkatkan efisiensi operasional, mendorong ketaatan dalam hal manajerial, dan memenuhi persyaratan dari regulasi dan peraturan yang ada.”

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah secara menyeluruh dengan peraturan pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah seharusnya dilandasi dengan pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Pengertian utama tentang sistem pengendalian internal pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: “Sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh

dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”. Selama ini acuan penerapan Sistem Pengendalian Intern pada instansi pemerintah adalah pengawasan melekat yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan dan pengawasan, instruksi presiden No. 01 tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan melekat, yang telah disempurnakan melalui keputusan Menteri PAN No. 30 tahun 1994 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004.

Definisi pengawasan melekat menurut Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Melekat dalam penyelenggaraan pemerintah adalah “Pengawasan melekat yang merupakan padanan istilah pengendalian manajemen atau pengendalian intern dan selanjutnya disebut waskat adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan suatu kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku”.

Terminologi pengawasan melekat dalam aturan tersebut disepadankan dengan pengendalian manajemen atau pengendalian internal. Unsur-unsur pengawasan yang melekat yang dimaksud adalah pengorganisasian personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, *supervise*, dan *review intern*. Adapun pengertian sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah “Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang diciptakan manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah”

Senada dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, mendefinisikan sistem pengendalian “Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian, efektifitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut: “Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

2.1.3.2 Prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Internal

Menurut Levany (2011:98), Sistem pengendalian intern yang baik akan dapat memprediksi terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas atas yang layak, walaupun terjadi kesalahan dan penyelewengan hal ini dapat diketahui dengan cepat. Usaha-usaha pimpinan perusahaan untuk menetapkan sistem pengendalian intern yang baik bertujuan untuk menunjang organisasi lebih efektif dalam rangka mencapai tujuannya. Bentuk-bentuk pengendalian yang sudah umum dapat dipilah dan diterima dengan membandingkan antara biaya dengan manfaat yang diharapkan.

Menurut Levany (2011:99) Untuk dapat mencapai tujuan pengendalian akuntansi, suatu sistem harus memenuhi enam prinsip dasar pengendalian

- 1) Pemisahan fungsi, tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari dan melakukan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidak beresan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas.
- 2) Prosedur pemberi wewenang, tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisasi oleh orang yang berwenang.
- 3) Prosedur dokumentasi, dokumentasi yang sangat penting dilakukan untuk menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumen member dasar penetapan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.
- 4) Prosedur dan catatan akuntansi tujuan pengendalian ini adalah agar dapat diadakannya catatan-catatan akuntansi teliti secara tepat dan tepat serta data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu.
- 5) Pengawasan fisik, pengawasan fisik berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.
- 6) Memeriksa intern secara bebas, menyangkut perbandingan antara asset dengan asset yang betul-betul ada.

2.1.3.3 Unsur-unsur Pengendalian Internal

Dalam menciptakan suatu sistem pengendalian internal yang baik terdapat beberapa unsur pokok yang harus ada dalam perusahaan atau instansi pemerintah agar dapat mencapai tujuan. Mulyadi (2008:164) menyebutkan empat unsur dalam pengendalian internal.

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan yang pembagiannya berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku.

- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam suatu organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Selanjutnya prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan akan menghasilkan informasi yang tepat dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi.
- c. Praktek yang sehat, Pembagian tanggung jawab fungsional dalam sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaannya.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya, Dari keempat unsur pokok pengendalian intern tersebut, unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat semuanya tergantung kepada sumber daya manusia yang melaksanakannya.

2.1.3.4 Tujuan Dan Tanggung Jawab Atas Pengendalian Internal

Menurut Hery (2016:132) Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaran. Manajemen memiliki tiga tujuan umum untuk merancang sistem pengendalian

internal yang efektif, yaitu keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Menurut tujuannya pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

Tujuan pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang:

- a. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
- b. penyelenggaraan pemerintah negara.
- c. Keandalan Pelaporan Keuangan.
- d. Pengamanan Aset Negara.
- e. Ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan menurut Rama & Jones (2008:134-135) tujuan pengendalian internal mencakup sebagai berikut:

- a. Efektivitas dan efisiensi operasi.
- b. Keandalan laporan keuangan.
- c. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- d. Pengamanan aset.

2.1.3.5 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mengajukan lima indikator yang dapat digunakan dalam mengukur Pengendalian Internal. Kelima indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menempatkan kualitas dalam organisasi dan berperan untuk mempengaruhi kesadaran akan orang-orang yang terlibat dalam suatu instansi mengenai pentingnya pengendalian, sehingga dalam konsep ini menempatkan unsur lingkungan pengendalian sebagai pondasi dasar atau penentu irama bagi semua unsur dalam sistem pengendalian intern lainnya. Yang dimaksud lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Dalam menerapkan unsur pengendalian intern, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian.

2. Penilaian Risiko

Tidak hanya pimpinan yang bertanggung jawab atas penilaian risiko yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah, melainkan seluruh pegawai yang ada di dalamnya harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memantau kejadian-kejadian yang akan menghambat pencapaian visi dan misi organisasi. Risiko yang timbul dalam suatu organisasi dapat disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal. Risiko internal misalnya adanya peralatan yang tidak memadai, sumber daya yang kurang kompeten, dan suasana kerja yang tidak kondusif. Risiko eksternal misalnya perubahan dalam pemerintahan, gangguan keamanan, atau bahkan bencana alam.

Proses penilaian risiko berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 meliputi:

- 1) Identifikasi risiko, yang dapat dilakukan dengan:
 - a. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi
 - b. Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.

- 2) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor internal dan faktor eksternal
- 3) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
- 4) Analisis risiko, yang dapat dilakukan dengan:
- 5) Menetapkan kemungkinan terjadinya risiko
- 6) Menetapkan dampak yang timbul akibat risiko dengan diidentifikasi benar benar terjadi.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai.

Kebijakan yang dibuat diharapkan mampu mengarahkan tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan dan berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan prosedur. Prosedur yang dimaksud merupakan petunjuk atas rangkaian urutan tindakan dalam melaksanakan kegiatan yang ada, yang disesuaikan sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian yang ada memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah
- 2) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
- 3) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah
- 4) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- 5) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara tertulis

- 6) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan membantu pegawai untuk mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya mampu memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern itu sendiri.

Sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, untuk dapat menciptakan komunikasi atas informasi menjadi efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus dapat memenuhi beberapa hal, yaitu:

- 1) Mampu menyediakan dan memanfaatkan bentuk dan sarana komunikasi
- 2) Mampu mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. Pemantauan juga merupakan tindak lanjut atas temuan audit dan evaluasi lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Apabila sistem pengendalian intern yang ada dalam instansi pemerintah dipantau secara berkala maka upaya pencapaian misi organisasi atau instansi pemerintah dapat terlaksana

dan pada akhirnya dalam jangka panjang visi pun dapat terwujud. Pemantauan atas pengendalian intern dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1) Pemantauan berkelanjutan, yang dapat dilakukan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Evaluasi terpisah, dapat dilakukan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.
- 3) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pelaksanaan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.4.1 Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pelaku utama pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara (Rulyanti, 2017).

Pada pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan terkait definisi keuangan daerah sebagai “seluruh hak dan kewajiban daerah yang bisa diukur dengan uang dan segala bentuk berbentuk uang dan barang yang merupakan kepunyaan daerah yang berelasi dengan penyelenggaraan atas hak dan kewajiban tersebut”. Sebagaimana definisi yang

terkandung dalam pasal 156 tersebut, keuangan daerah mencakup unsur yang bisa dinilai dengan uang, seperti unsur hak kewajiban daerah serta aset yang berelasi dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 memaparkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yakni semua program yang mencakup perancangan, penyelenggaraan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah yang dipaparkan oleh Dhiyavani (2017) yakni bermaksud agar pengelolaan keuangan rakyat yang berada di tangan pemerintah dijalankan dengan transparan, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban atas keuangan agar terbentuk akuntabilitas dalam pengelolaan. Dari penjelasan Dhiyavani dapat dikatakan bahwa seharusnya pengelolaan keuangan daerah itu dilaksanakan secara transparan dalam segi penyusunan dan pertanggung jawabannya serta ketepatan sasaran pengelolaan keuangan daerah agar mampu memenuhi keinginan masyarakat tentang konsep transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

UU Nomor 15 Tahun 2004 terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara, menyatakan perihal keuangan negara harus diproses dengan teratur, sesuai dengan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan mempertunjukkan keadilan dan kepatuhan. Dengan demikian supaya dapat terealisasi pengelolaan keuangan yang baik, maka harus dilaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Serta dalam UU No. 15 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa ada empat pendapat yang diberikan pemeriksa yakni: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (OTP) dan Pernyataan

Menolak memberi Opini. Menurut Weni Nirmala Sari (2017), tujuan dari pengelolaan keuangan daerah yakni:

1. Mengoptimalkan penggunaan sumber penghasilan suatu daerah.
2. Membuat optimalisasi dari anggaran daerah yang lalu.
3. Sebagai dasar resmi dari sebuah program supaya lebih terarah dan tertib juga akan mempermudah dalam pengawasan.
4. Memudahkan koordinasi dari setiap institusi dan bisa diarahkan sebagaimana prioritas dan dituju oleh pemerintah daerah.
5. Sebagai wadah untuk meninjau kembali dan memberi kemudahan untuk pengambilan keputusan mengenai alokasi pembiayaan setiap proyek atau keperluan lain yang diajukan oleh setiap institusi.

2.1.4.2 Indikator Pengelolaan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan daerah, yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah:
 - a. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
 - b. Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan

keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang tertuang dalam PP No.71 Tahun 2010. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

4. Pengawasan

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Domai (2002:21) tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah:

- a. Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan suatu daerah.
- b. Perbaiki dari anggaran daerah sebelumnya. Setiap anggaran daerah yang dibuat/disusun diusahakan perbaikan.

- c. Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah dan teratur dan memudahkan untuk melakukan pengawasan
- d. Memudahkan koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diprioritaskan dan dituju oleh pemerintah daerah
- e. Untuk menampung dan menganalisis serta memudahkan dalam pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap proyek-proyek atau kebutuhan lain yang diajukan oleh masing-masing institusi.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu cara agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan diadakannya pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan keuangan rakyat yang dipegang oleh pemerintah dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggung jawabannya sehingga akan tercipta akuntabilitas didalam pengelolaannya. Pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.5 Kejelasan Sasaran Anggaran

2.1.5.1 Pengertian Kejelasan Sasaran

Anggaran Menurut Halim & Syam Kusufi (2012) mengatakan bahwa anggaran memiliki peranan penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintahan. Anggaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam satu tahun yang disusun secara jelas dan spesifik, dan merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah (Syafrial, 2009). Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama

periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009:61). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja salah satu diantaranya adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan untuk menyusun rencana kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah daerah (Nadirsyah dkk, 2012).

Menurut Kenis dalam Nadirsyah dkk (2012:64) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Menurut Steers dan Porter dalam Putra (2013) bahwa dalam menentukan sasaran anggaran mempunyai karakteristik utama yaitu:

1. Sasaran harus spesifik bukan samar-samar.
2. Sasaran harus menantang namun dapat dicapai.

Selain itu, kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Putra, 2013).

2.1.5.2 Keuntungan Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Locke & Latham dalam Putra (2013) menyatakan bahwa keuntungan kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produktivitas dan perbaikan kualitas kerja. Kejelasan sasaran anggaran akan memberikan motivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja.
2. Membantu menjelaskan apa-apa yang diharapkan. Sasaran anggaran yang jelas akan memberikan gambaran yang akan dicapai.
3. Menghilangkan kejenuhan.
4. Meningkatkan kepuasan terhadap hasil kerja yang dicapai.
5. Mempengaruhi tingkat persaingan pekerja secara spontan yang mana lebih lanjut akan meningkatkan kinerja mereka. Setiap pekerja akan termotivasi untuk bersaing secara sportif untuk bekerja sebab mereka dapat memahami arah perusahaan dengan mengetahui sasaran yang jelas.
6. Meningkatkan rasa kepercayaan diri dan rasa bangga jika sasaran tercapai dan akan menerima tantangan lebih lanjut.
7. Membangkitkan rasa mampu dalam bekerja sehingga akan meningkatkan kinerja. Sasaran yang jelas akan mampu membangkitkan motivasi kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja para pekerja.

2.1.5.3 Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Indikator Kejelasan sasaran anggaran menurut menurut Kenis & Kurnia (2014) adalah:

1. Jelas, Sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara jelas dan tidak bermakna ganda.
2. Spesifik, Sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara spesifik dan detail, agar tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam macam.
3. Mengerti, Sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan harus mudah dimengerti serta menjadi prioritas utama.

2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.6.1 Definisi Kinerja

Kinerja merupakan pencapaian dari suatu usaha entah itu berhasil atau tidak sesuai dengan tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja sektor publik bukan hanya bagaimana kemampuan uang public dibelanjakan, tetapi dilihat juga dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektifitas, dan tentunya dari segi outcome. Pengukuran kinerja sektor publik dilaksanakan untuk menilai pencapaian organisasi melalui alat ukur keuangan dan non keuangan. Untuk melakukan pengukuran kinerja dengan melihat variabel kunci kemudian dikembangkan pada unit kerja yang bersangkutan untuk dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja, dari sinilah kita bisa mengetahui kinerja suatu organisasi sudah sesuai dengan yang direncanakan meliputi ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan lain-lain atau tidak. Jika tidak tercapai maka dikatakan bahwa pengukuran kinerja suatu organisasi tidak berjalan sebagaimana semestinya. Dan jika pencapaiannya melebihi dari yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa entitas tersebut memiliki kinerja yang sangat baik (Halim, 2012: 142)

Menurut Ronald dan Sarmiyatiningsih (2010) “kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur”. Pengukuran kinerja

keuangan memiliki banyak tujuan, paling tidak untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan transparansi publik. Selain itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah akan bermanfaat dalam hal untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Ibnu Syamsi, 1986: 199). Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

2.1.6.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

2.1.6.1.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan dalam kinerja keuangan daerah adalah unit pemerintahan yang memiliki kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggarannya berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, entitas pelaporan wajib membuat laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan terdiri dari:

1. Neraca, yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan entitas pelaporan pada akhir periode pelaporan.
2. Laporan Realisasi Anggaran, yang menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan entitas pelaporan selama periode pelaporan.
3. Laporan arus kas, yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas entitas pelaporan selama periode pelaporan.
4. Catatan atas laporan keuangan, yang memberikan informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Laporan kinerja adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai pencapaian sasaran kinerja entitas pelaporan. Laporan kinerja terdiri dari:

- 1) Ikhtisar kinerja, yang menyajikan informasi mengenai pencapaian sasaran kinerja entitas pelaporan secara keseluruhan.
- 2) Ikhtisar kinerja keuangan, yang menyajikan informasi mengenai pencapaian sasaran kinerja keuangan entitas pelaporan.

- 3) Ikhtisar kinerja nonkeuangan, yang menyajikan informasi mengenai pencapaian sasaran kinerja nonkeuangan entitas pelaporan.
- 4) Catatan atas laporan kinerja, yang memberikan informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami laporan kinerja.

Entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP adalah standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja entitas pemerintah. Selain laporan keuangan dan laporan kinerja, entitas pelaporan juga wajib membuat laporan lain yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.6.1.2 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang dianutnya. Entitas akuntansi mengacu pada sebuah entitas yang dikukuhkan untuk tujuan akuntansi untuk aktivitas-aktivitas tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, entitas akuntansi pemerintah daerah wajib membuat laporan keuangan berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan tersebut harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Selain laporan keuangan tersebut,

entitas akuntansi pemerintah daerah juga dapat membuat laporan keuangan lain yang diperlukan, misalnya:

- 1) Laporan Kinerja Keuangan
- 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 3) Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyusunan laporan keuangan lain tersebut harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Entitas akuntansi pemerintah daerah tidak wajib membuat semua laporan keuangan yang ada, hanya laporan keuangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6.2 Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Pengukuran kinerja keuangan memiliki banyak tujuan, paling tidak untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan transparansi public sehingga indicator yang digunakan dalam mengukur variabel kinerja keuangan yaitu: *relevant, unambiguous dan cost-effective* (Sumarsono,2010)

2.1.7 Komitmen Organisasi

2.1.8.1 Definisi Komitmen Organisasi

Komitmen sering dikaitkan dengan keadaan dimana seorang pegawai memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Menurut Darmawan (2013:169) mendefinisikan komitmen organisasi adalah sebuah konsep yang memiliki tiga dimensi, yaitu komitmen afektif, berkelanjutan dan normatif.

Kemudian menurut Robbins & Judge (2016:367) mengatakan bahwa komitmen organisasi didefinisikan sebagai kegiatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi

yang dicirikan oleh penerimaan nilai dan tujuan organisasi, kesediaan berusaha demi organisasi dan keinginan mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi merupakan rasa kepercayaan akan nilai-nilai organisasi, serta kesetiaan terhadap organisasi untuk berkarya dan memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan di organisasi.

2.1.8.2 Manfaat Komitmen Organisasi

Menurut Juniarari (2011:85) mengatakan bahwa manfaat dengan adanya komitmen dalam organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Para pekerja yang akan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap organisasi mempunyai kemungkinan yang jauh lebih besar untuk menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam sebuah organisasi.
- b. Memiliki keinginan yang kuat untuk tetap bekerja pada organisasi dan dapat terus memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan.
- c. Sepenuhnya melibatkan diri pada pekerjaan mereka, karena pekerjaan tersebut adalah mekanisme kunci dan saluran individu untuk memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan organisasi.

2.1.8.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi

Darmadi (2018:209) mengemukakan faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi yaitu:

1. Faktor Personal, misalnya Usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian, dll. Termasuk faktor kepribadian antara lain etos kerja, kesediaan untuk memberi keuntungan pada organisasi dari apa yang dikerjakan dan keinginan untuk mengaktualisasikan diri dan pengembangan karir

2. Faktor Organisasional, meliputi kepekaan terhadap loyalitas organisasi, keamanan kerja dan insentif ekonomi.
3. Faktor Relasional, meliputi kepercayaan dari atasan, komunikasi dengan atasan dan rekan kerja serta umpan balik positif dari pimpinan atau klien.

Priansa (2018: 245) menyatakan faktor yang mempengaruhi komitmen organisasional yakni:

1. Keadilan dan Kepuasan Kerja, hal yang paling mempengaruhi loyalitas pegawai adalah pengalaman kerja positif dan adil. Komitmen organisasional akan sulit dicapai apabila pegawai menghadapi beban kerja yang meningkat namun justru keuntungan yang diperoleh organisasi hanya dinikmati oleh pimpinan atau manajer tingkat atas saja.
2. Keamanan Kerja, pegawai membutuhkan hubungan kerja yang saling timbal balik dengan organisasi. Keamanan kerja harus diperhatikan untuk memelihara hubungan dimana pegawai percaya usaha mereka akan dihargai oleh organisasi, pimpinan, maupun manajer organisasi.
3. Pemahaman organisasi, merupakan identifikasi secara personal terhadap organisasi. Sikap ini akan menguat ketika pegawai memiliki pemahaman yang kuat tentang organisasi.
4. Keterlibatan pegawai, pegawai merasa menjadi bagian dari organisasi ketika mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan organisasi.
5. Kepercayaan pegawai, kepercayaan juga merupakan sebuah aktivitas timbal balik. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus saling mempercayai.

2.1.8.4 Indikator Komitmen Organisasi

Indikator komitmen organisasi dalam Krisnawati dan Suartana (2017), adalah:

1. Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi.
2. Kemauan yang besar untuk berusaha bagi organisasi.
3. Kepercayaan yang kuat dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi

2.2 Tinjauan Empiris

Ikhyanuddin dkk. (2022) yang menguji Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah; dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Secara simultan, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

Liow (2021) yang menguji Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kota-Kota Yang Ada Di Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengelolaan keuangan yang diukur dengan Rasio Efektifitas dan Efisiensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pengelolaan keuangan yang diukur dengan Rasio Efektifitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Pengelolaan keuangan yang diukur dengan Rasio Efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

Pradana dkk, (2022) yang menguji Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Sumatera Bagian Selatan). Metode analisis

penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan kemakmuran berpengaruh signifikan terhadap keuangan kinerja pemerintah daerah di kabupaten/kota se-provinsi Selatan Sumatera, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan pulau-pulau. Bangka Belitung)

Cantika (2021) yang menguji Pengaruh Partisipasi Anggaran, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kinerja Manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Provinsi Jambi. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, peneliti menetapkan kesimpulan dari penelitian ini adalah: Tingginya partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diterapkan dengan baik maka akan menghasilkan peningkatan, dan hasil yang baik pula terhadap kinerja manajerial. Komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.

Rais dkk, (2022) yang menguji Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia di Mediasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Laporan Keuangan Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya pengaruh tidak langsung Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Laporan Keuangan Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui PengendalianInternal menghasilkan pengaruh positif signifikan.

Fitriyanti R dkk, (2015) yang menguji Pengaruh Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Skpd Kabupaten Kepulauan Meranti). Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap nilai hitung $t > t_{tabel}$ $3.266 > 2.030$, pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai hitung $t > t_{tabel}$ $2.383 > 2.030$ dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai hitung $t > t_{tabel}$ $2.419 > 2.030$ terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Andrianto & Rahmawati (2017) yang menguji Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sleman). Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah. bahwa penerapan sistem pengendalian internal dapat membantu untuk mencapai tingkat kinerja yang ditargetkan dan mencegah terjadi kehilangan sumber daya.

Nurhaeda & tenriola (2022) yang menguji pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai). Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah, dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sinja

Blongkod (2023) yang menguji Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Implementasi Simda Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Provinsi Gorontalo). Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan melalui sistem informasi manajemen daerah pada organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Gorontalo.

Sains F (2018) yang menguji Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah). Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Secara parsial pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; (2) Secara parsial transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Secara simultan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Radiansyah dkk. (2022) yang menguji Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kualitas Laporan Keuangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran

anggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat terlihat dari nilai t hitung sebesar 3,317 lebih besar dari nilai tabel 2,001, dan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil daripada 0,05. Variabel kejelasan sasaran anggaran mempunyai peran penting terhadap kinerja keuangan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Syukur (2022) yang menguji Pengaruh Kejelasan Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menemukan bahwa kejelasan anggaran, sistem pengendalian intern dan anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Velia Brenda (2020) yang menguji Analisis Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal pemerintah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) (Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan). Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil penelitian menemukan bahwa (1) Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan good governance (2) Sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan good governance (3) Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan good governance (4) Kinerja aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan good governance.

Jannah M (2021) yang menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota medan. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap Pengelolaa Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan, Penilaian Resiko berpengaruh terhadap Pengelolaa Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan, Kegiatan Pengendalian berpengaruh terhadap Pengelolaa Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan, Sistem Informasi berpengaruh terhadap Pengelolaa Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan, Pemantauan berpengaruh terhadap Pengelolaa Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan dan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi dan Pemantauan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.

Pratama & Taqwa (2019) yang menguji Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap Pengelolaa Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan, Penilaian Resiko berpengaruh terhadap Pengelolaa Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan, Kegiatan Pengendalian berpengaruh terhadap Pengelolaa Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan, Sistem Informasi berpengaruh terhadap Pengelolaa Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan, Pemantauan berpengaruh terhadap Pengelolaa Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan dan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi dan Pemantauan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan.

Krisnawati & Suartana (2017) yang menguji pengaruh kompetensi karyawan, motivasi kinerja, komitmen organisasi, kemampuan Teknik personal terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Karyawan, Motivasi Kerja, Komitmen Organisasi dan Kemampuan Teknik Personal berpengaruh positif terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. Hal tersebut berarti semakin tinggi Kompetensi Karyawan dengan sistem yang digunakan maka kinerja sistem informasi akuntansi semakin baik. Semakin besar Motivasi Kerja maka kinerja sistem yang digunakan semakin baik. Semakin tinggi dukungan Komitmen Organisasi maka semakin tinggi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. Semakin tinggi Kemampuan Teknik Personal maka semakin tinggi kinerja sistem informasi akuntansi.

Muhammad Ilham M (2022) yang menguji pengaruh akuntabilitas dan *value for money* terhadap kinerja keuangan dengan standar akuntabilitas pemerintahan sebagai variabel moderasi. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dan *value for money* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dalam efek moderasi dalam penelitian ini, standar akuntansi pemerintahan dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah dan pengaruh *value for money* terhadap kinerja keuangan, hasilnya dapat memperkuat variabel tersebut.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Pada organisasi swasta maupun organisasi pemerintah, kinerja atau prestasi kerja pegawai merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Kinerja organisasi tidak dapat dilepaskan dari kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Dengan demikian, maju atau tidaknya suatu organisasi sangat ditentukan oleh baik atau tidaknya kinerja pegawainya. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang telah dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, ketangguhan dan waktu.

Menurut Ronald dan Sarmiyatiningsih (2010) "kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur". Pengukuran kinerja keuangan memiliki banyak tujuan, paling tidak untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan transparansi publik. Selain itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah akan bermanfaat dalam hal untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

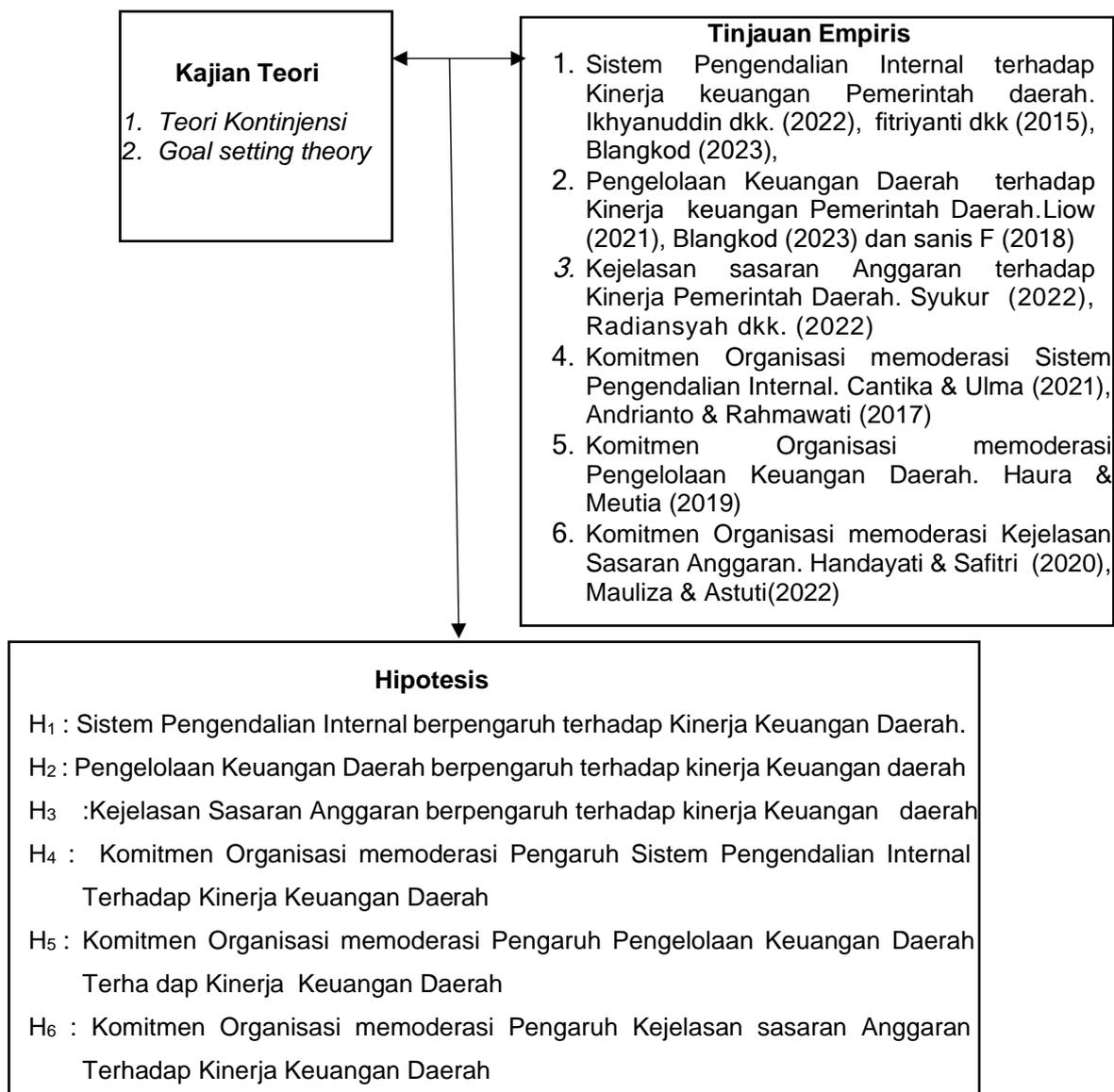
Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pelaku utama pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara (Rulyanti, 2017).

Anggaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam satu tahun yang disusun secara jelas dan spesifik, dan merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah (Syafrial, 2009). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja salah satu diantaranya adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan untuk menyusun rencana kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah daerah (Nadirsyah dkk, 2012).

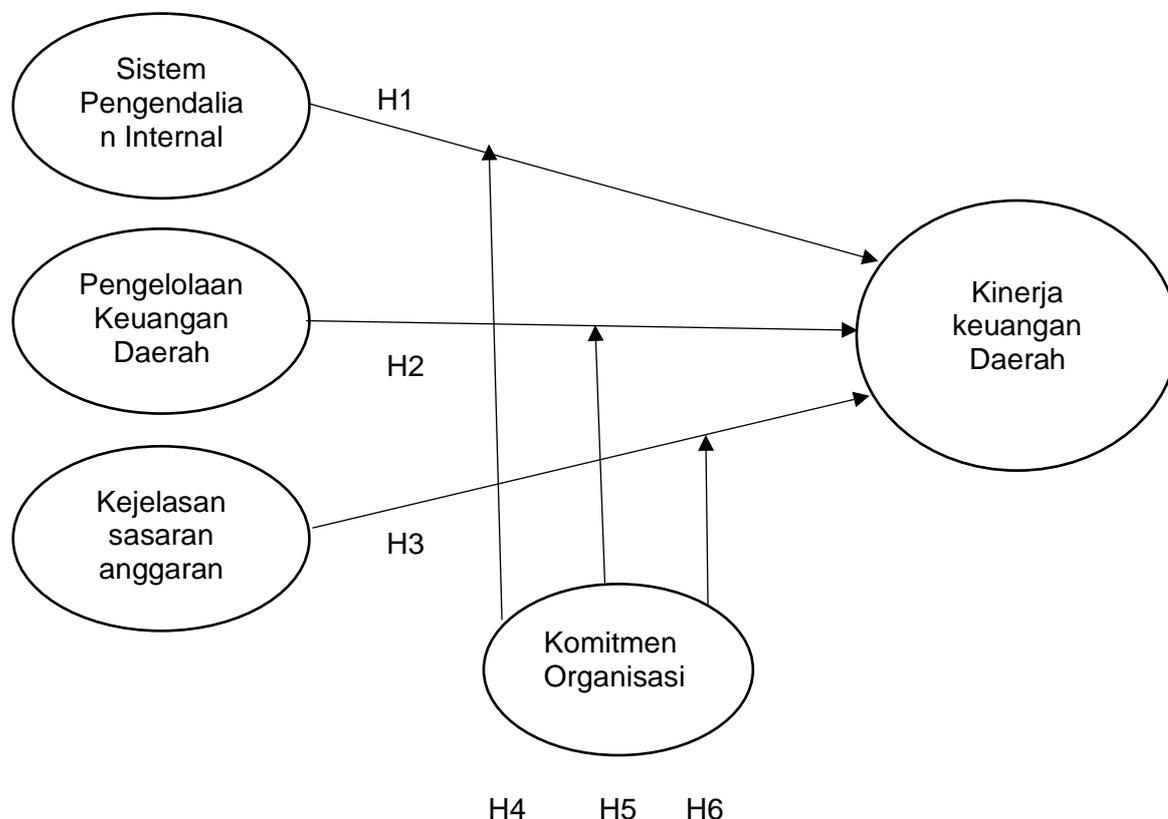
Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Apabila setiap pegawai memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan prestasi terbaik bagi masyarakat, maka tentunya kinerja sektor publik akan meningkat (Mahmudi, 2007). Komitmen organisasi dapat tercipta jika organisasi/perusahaan memberi dorongan, respek, menghargai kontribusi dan memberi apresiasi bagi individu dalam pekerjaannya. Hal ini berarti, jika organisasi peduli dengan keberadaan dan kesejahteraan personal anggota/pegawai dan juga menghargai kontribusinya, maka anggota/pegawai akan meningkatkan komitmennya terhadap organisasi.

Kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini berdasarkan konsep, teori dan penelitian empiris yang telah ditemukan. Kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut :



3.1 Gambar Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah diuraikan sebelumnya, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :



3.2 Gambar Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis

3.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja keuangan Daerah

Menurut PP nomor 60 tahun 2008 kegiatan pengendalian harus diselenggarakan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Sementara kinerja menurut Sutrisno (2010) adalah ketika seseorang diharapkan bisa memiliki fungsi dan berperilaku untuk melakukan tugas sesuai dengan apa yang dibebankan

kepadanya. Kegiatan pengendalian merupakan suatu kebijakan maupun prosedur dalam pelaksanaan pengendalian internal. Adanya kegiatan pengendalian sangat penting agar proses pengendalian internal berjalan sesuai dengan rencana.

Teori penetapan tujuan menyatakan bahwa pemikiran dan niat merupakan penggerak dari perilaku setiap individu. Perilaku dari kinerja individu dipengaruhi oleh pemahamannya mengenai tujuan dari organisasinya tersebut. Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory) menjelaskan bahwa kejelasan tujuan dan komitmen individu untuk mencapainya dapat meningkatkan kinerja. Teori ini memiliki hubungan yang erat dengan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan, Hal ini sejalan dengan peran sistem pengendalian internal dalam menetapkan tujuan keuangan yang spesifik dan terukur. Teori Penetapan Tujuan dan sistem pengendalian internal bekerja sama untuk memastikan bahwa tujuan keuangan organisasi tercapai. Sistem pengendalian internal membantu memastikan bahwa semua aktivitas dan sumber daya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengendalian internal dibutuhkan untuk mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang baik, sehingga memberi keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai telah dilaksanakan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ikhyanuddin dkk (2022), Fitriyani R dkk (2015) dan blongkod (2023) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan daerah

3.2.2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pelaku utama pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara (Rulyanti, 2017). Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah yang dipaparkan oleh Dhiyavani (2017) yakni bermaksud agar pengelolaan keuangan rakyat yang berada di tangan pemerintah dijalankan dengan transparan, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban atas keuangan agar terbentuk akuntabilitas dalam pengelolaan.

Teori penetapan tujuan menyatakan bahwa pemikiran dan niat merupakan penggerak dari perilaku setiap individu. Perilaku dari kinerja individu dipengaruhi oleh pemahamannya mengenai tujuan dari organisasinya tersebut. Kusuma (2013) menyatakan ketepatan anggaran dipengaruhi oleh penetapan tujuan. Visi dan misi organisasi merupakan tujuan utama sehingga diperlukan target kinerja yang jelas, oleh sebab itu setiap organisasi diharuskan menetapkan tujuan sasaran (goal), yang kemudian diformulasi dalam rencana anggaran. Sehingga dalam perencanaan anggaran perlu dicantumkan sasaran atau target yang ingin dicapai organisasi, tidak hanya memuat jumlah nominal dan perencanaan yang dibutuhkan setiap program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi. Teori ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan individu dalam menyusun dan mengelola anggaran merupakan tujuan yang ingin dicapai. Dengan menggunakan pendekatan teori penetapan tujuan, efektifitas implementasi ketercapaian anggaran diidentikkan sebagai tujuannya.

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat dibutuhkan. Maka perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting untuk dilakukan, baik dalam aspek anggaran ataupun aspek pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Blongkod (2023) dan Sauns F (2018) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan daerah

3.2.3 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja keuangan Daerah

Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting oleh karena itu, pencapaian keberhasilan dalam suatu organisasi sangat ditentukan pada proses penyusunan anggaran tersebut, jika kualitas anggaran pemerintah daerah rendah, maka kualitas fungsi-fungsi pemerintah cenderung lemah (Astini dkk, 2014:2). Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Hazmi dkk, 2012:4).

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas (Astini dkk, 2014:2). Kejelasan sasaran anggaran dimaksudkan untuk meningkatkan tanggungjawab individu dan organisasi dalam pencapaian sasaran anggaran (Hazmi dkk, 2012:1). Sehingga diharapkan organisasi akan lebih membuka ruang dan perencanaan yang sebaik mungkin dalam menyusun anggarannya (Hazmi dkk, 2012:1). Jika sasaran anggaran bisa ditetapkan dan dibuat secara jelas dan spesifik, maka anggaran tersebut dapat

dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut sehingga akan membantu aparaturnya pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Hazmi dkk, 2012:1).

Teori penetapan tujuan menyatakan bahwa pemikiran dan niat merupakan penggerak dari perilaku setiap individu. Perilaku dari kinerja individu dipengaruhi oleh pemahamannya mengenai tujuan dari organisasinya tersebut. Kusuma (2013) menyatakan ketepatan anggaran dipengaruhi oleh penetapan tujuan. Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauh mana tujuan Anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar Anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian Anggaran tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian Syukur (2022) dan Radiansyah dkk (2022) yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kejelasan Sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan daerah.

3.2.4 Pengaruh Moderasi Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja keuangan Daerah

Robbins dan Judge (2016:367) mengatakan bahwa komitmen organisasi didefinisikan sebagai kegiatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi yang dicirikan oleh penerimaan nilai dan tujuan organisasi, kesediaan berusaha demi organisasi, dan keinginan mempertahankan keanggotaan dalam organisasi.

Teori kontinjensi adalah teori yang menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mendesain dan menggunakan sistem pengendalian internal, tetapi hal itu tergantung pada situasi dan kondisi organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa ada beberapa faktor kontinjensi yang mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian internal dan kinerja keuangan daerah, seperti lingkungan, strategi, teknologi, ukuran, struktur, dan budaya.

Hasil penelitian Satriawan & Dewi (2020) menunjukkan Komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah. Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, memiliki persepsi yang positif dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh Sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan daerah.

3.2.5 Pengaruh Moderasi Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja keuangan Daerah

Teori Kontinjensi merupakan pendekatan yang menginginkan supaya kinerja dari suatu organisasi bisa optimal. Teori kontinjensi ini berperan dalam pemberian perhatian mengenai sifat lingkungan pada strategi dan struktur organisasi, keperluan yang dibutuhkan organisasi, dan juga cara organisasi tersebut itu menjalankan struktur organisasi yang baik seharusnya menanggapi sejumlah variabel (*contingencies*). Teori kontinjensi mengemukakan keberhasilan organisasi bergantung pada kesesuaian antara struktur organisasi, strategi dan lingkungan. Ketika struktur organisasi sesuai dengan lingkungan, pegawai akan lebih mudah memahami peran mereka dan merasa lebih terhubung dengan organisasi. Hal ini dapat meningkatkan komitmen organisasi.

Komitmen organisasi adalah kemampuan individu dan kemauan menyelaraskan perilakunya dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi untuk tujuan atau kebutuhan organisasi (Sudarmanto, 2014). Seorang karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan memiliki identifikasi terhadap organisasi, terlibat sungguh-sungguh dalam kepegawaian dan ada loyalitas serta afeksi positif terhadap organisasi (Umam K, 2012). Selain itu sikap dan tingkah laku berusaha ke arah tujuan organisasi dan keinginan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi, sehingga karyawan akan berusaha semaksimal mungkin untuk semakin meningkatkan kinerjanya.

Dhiyavani (2017) mengatakan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan dalam segi penyusunan dan pertanggung jawabannya serta ketepatan sasaran pengelolaan keuangan daerah agar mampu memenuhi keinginan masyarakat tentang konsep transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Pegawai yang menunjukkan komitmen tinggi memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam menyokong kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempat bekerja dan dapat menghasilkan kinerja yang baik pada organisasi tersebut.

Hasil Penelitian Silfiani & Fauzi (2021) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya komitmen terhadap pemahaman pengelolaan keuangan dapat terwujud kinerja pengelolaan yang berjalan secara ekonomis, efisien, efektif transparan, dan akuntabel, sehingga perlu dilakukan perubahan dengan adanya komitmen dari seluruh komponen organisasi mulai dari pimpinan sampai staf untuk menyiapkan anggaran dan kegiatan untuk memahami pengelolaan keuangan daerah.

H5: Komitmen organisasi memoderasi pengaruh Pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah.

3.2.6 Pengaruh Moderasi Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah

Hilmi (2005) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran mencerminkan sejauh mana sasaran anggaran dinyatakan secara spesifik, jelas dan dapat dipahami bagi yang bertanggungjawab untuk mencapainya. Sasaran yang tidak jelas atau membingungkan dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan para pelaksana. Implikasinya yaitu pada penurunan kinerja yang berarti akan berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Komitmen organisasi yang rendah akan membuat individu untuk berbuat untuk kepentingan pribadinya.

Teori kontinjensi mengemukakan bahwa efektivitas suatu organisasi bergantung kesesuaian antara struktur, strategi dan lingkungan. Pegawai dengan komitmen organisasi tinggi lebih bersedia beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan strategi. Lingkungan dan strategi yang baik membuat sasaran anggaran lebih jelas dan mempermudah pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam mencapai tujuan anggaran tersebut. Dalam usaha pencapaian tujuan anggaran tersebut akan berdampak terhadap peningkatan kinerja yang tentunya akan berpengaruh terhadap komitmen organisasi, karena komitmen organisasi yang tinggi akan menimbulkan usaha yang keras untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Hasil penelitian Handayati & Safitri (2020), Mauliza & Astuti (2022) menunjukkan Komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh Kejelasan sasaran anggaran pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah. hasil

penelitian menunjukkan semakin tinggi tingkat komitmen organisasi seorang manajer maka semakin tinggi pula pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran terhadap kinerja keuangan daerah.